**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

* 1. **Kajian Pustaka**

**2.1.1 Good Corporate Governance**

*Governance* diambil dari kata latin, yaitu *gubernance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* yang diartikan sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan *(control)* kegiatan organisasi, termasuk perusahaan.

Dalam peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor Per-09/MBU/2012 tentang perubahan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor per-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, menyebutkan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengeplolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Pertama kali *corporate governance* diperkenalkan oleh Cadbury Comittee dalam Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2013:101) dipaparkan sebagai berikut:

“*A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled* (Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan)”

Ada banyak definisi untuk *Good Corporate Governance* (GCG) menurut *Organization for Economic Co-operation and Development* (OEDC) dalam Nuriyatun (2014:34) adalah:

*“Corporate governance is the system by wich business corporations are directed and controlled.The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as, the board managers, shareholders and other stakeholder, and spells put the rule and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.”*

OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham , dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Coporate governance* yang baik dapat memberikan insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.*Corporate Governance* berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berperan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota, *stakeholder* non pemegang saham.

Adapun pengertian mengenai GCG menurut Sukrisno Agoes(2013:101), yaitu:

“Tata kelola yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya .”

*International Good Practice Guidance (IFAC 2009) Corporate governance* didefinisikan sebagai serangkaian praktik dan tanggung jawab yang dilakukan oleh dewan (komisaris) dan eksekutif manajemen dengan tujuan memberi arahan–arahan yang strategis, memastikan bahwa tujuan yang diinginkan dapat tercapai,memastikan bahwa semua resiko dapat dikelola dengan benar, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara bertanggungjawab.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham , pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan tugas, hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta dapat mengelola resiko dengan benar. Apabila mekanisme *Good Corporate Governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

Menurut Nuriyatun (2014) pada tahun 2004, *Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)* telah mengeluarkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang dikembangkan seuniversal mungkin. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai karakteristik sistem hukum, budaya, dan lingkungan yang berbeda. Dengan demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh semua negara atau perusahaan namun diselaraskan dengan sistem hukum, aturan, atau nilai yang berlaku di negara masing-masingbilamana diperlukan. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh OECD yaitu:

1. Memastikan dasar bagi kerangka *corporate governance* yang efektif *(Ensuring The Basis for an Effective Corporate governance Framework).* Kerangka *corporate governance* harus meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas mengartikulasikan pembagian kewajiban antara pengawas, regulator dan otoritas pelaksanan yang berbeda.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci *(The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions).* Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham.
3. Persamaan perlakuan bagi pemegang saham *(The Equitable Treatment of Shareholders).* Kerangka *corporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
4. Peranan *shareholder* dalam *corporate governance* (*The Role of Stakeholders in Corporate governance*).Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak stakeholder yang ditetapkan oleh hukum atau melalui *mutul agreement* dan mendorongkerjasama aktif antara korporat dan stakeholder dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan perusahaan yang memiliki *sustainable.*
5. Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*). Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dibuat atas semua hal yang material menyangkut korporat, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.
6. Kewajiban dewan (*The Responsibilities of the Board).*Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat dijadikan titik acuan bagi para pemerintah dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal, prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia. Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) tahun 2012 dalam Sukrisno Agoes (2013:103) memaparkan azas-azas GCG yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (r*esponsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Penjelasan mengenai azas-azas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

1. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

1. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

1. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berkaitan dengan teori keagenan, *Corporate governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara dewan komisaris, manajemen perusahaan, dan para pemegang saham. *Corporate governance* adalah suatu konsep yang berdasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*).

**2.1.1.1 Tujuan Good Corporate Governance**

Tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Apabila *good corporate governance* dalam kepemilikan manajerial dapat berjalan dengan baik, maka dapat meningkatkan keberhasilan dan akuntabilitas perusahaan.

Tujuan dari *good corporate governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2011:34) adalah:

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat
4. Kegiatan - kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

Terdapat 5 (lima tujuan dari penerapan GCG pada BUMN menurut KEPMEN BUMN Per-09/MBU/2012 yaitu:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif,serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;

5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan *good corporate gvernance* adalah berupa penerapan sistem *good corporate governance* yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang sebagaimana melindungi para pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dan tata kelola organisasi, kemudian meningkatkan kualitas hubungan antara *stakeholder* dengan manajemn perusahaan.

**2.1.1.2 Mekanisme Good Corporate Governance**

a. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan.

Jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer jauh lebih peduli tentang kepentingan pemegang saham dan opsi saham akan memiliki insentif untuk kontribusi perusahaan. Dengan demikian, struktur modal dengan kepemilikan manajemen yang tinggi mampu menurunkan biaya keagenan (Saputri, 2010). Namun menurut Bayu (57: 2010), kepemilikan manajerial yang tinggi akan mempengaruhi keinginan manajemen untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk manajemen sendiri sehingga meningkatkan manajemen laba. Seorang manajer yang juga mempunyai saham mempunyai kepentingan pribadi yaitu adanya return yang diperoleh dari kepemilikan sahamnya pada perusahaan tersebut.

b. Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan. Dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan, semakin banyak dewan komisaris maka akan menurunkan praktik manajemen laba (Widiatmadja, 2010:39).

c. Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas, serta bebas dari hubungan bisnis dan atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata – mata demi kepentingan perusahaan. Bahwa perusahaan yang memiliki lebih sedikit komisaris independen akan meningkatkan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki komite audit yang terdiri dari banyak komisaris independen (Fachrony, 2015:21).

**2.1.2 Leverage**

Menurut Sutrisno (2012:201) *leverage* adalah penggunaan aset atau sumber dana dimana untuk pengguna tersebut perusahaan harus menanggung biaya tetap atau beban tetap. Kemudian menurut Gitman (2012:629) mengungkapkan akibat dari penggunaan biaya tetap untuk memperoleh *return* dari perusahaan. Secara umum *leverage* akan menimbulkan peningkatan *return* dan *risk* bagi perusahaan. Sebaliknya penurunan *leverage* akan menurunkan *return* dan *risk*.

Menurut Kasmir (2013:151) menjelaskan bahwa *leverage,*“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.”

Sedangkan menurut Agnes Sawir (2013: 13) mengenai definisi *leverage* adalah sebagai berikut:

“*Leverage ratio* digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas suatu perusahaan. Sehingga rasio ini menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya seandainya pada saat itu perusahaan tersebut akan dilikuidasi.”

Menurut Darsono (2009:56) *leverage* adalah penggunaan utang untuk meningkatkan total harta, atau *leverage* adalah penggunaan biaya tetap atas aset atau beban tetap atas dana untuk meningkatkan hasil (*return*) pemilik perusahaan.

*Leverage* menunjukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan utang. Apabila hasil pengembalian atas aset lebih besar daripada biaya utang, *leverage* tersebut menguntungkan dan hasil pengembalian atas modal dengan penggunaan *leverage* ini juga akan meningkat. Tetapi jika hasil pengembalian atas aset lebih kecil daripada biaya utang, maka *leverage* akan mengurangi hasil pengembalian atas modal.

Tuntutan terhadap kreditur harus didahulukan dibandingkan dengan pembagian hasil kepada pemegang saham. Pemberi pinjaman juga berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar utang sebab semakin banyak utang perusahaan, semakin tinggi kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Manajemen jelas berkepentingan terhadap utang perusahaan agar dapat membayar kewajibannya.

Menurut Bringham dan Houston (2010:140) prosedur yang digunakan oleh para analis untuk meninjau utang perusahaan yaitu mereka memeriksa neraca untuk menentukan proporsi total dana yang diwakili utang, dan mereka meninjau laporan laba rugi untuk melihat sejauh mana beban tetap dapat ditutupi oleh laba operasi.

**2.1.2.1 Tujuan dan Manfaat Leverage Ratio**

Menurut Kasmir (2013:153) ada beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepadapihak lainnya (kreditor)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.

**2.1.2.2 Pengukuran Leverage**

Menurut Sartono (2010:121) ada lima rasio *leverage* yang bisa dimanfaatkan perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. *Total Debt to Total Asset Ratio*

Rasio total utang dengan total aktiva yang biasa disebut rasio utang (*Debt Ratio*) mengukur persentase besarnya dana berasal dari utang.

Yang dimaksud dengan utang adalah semua utang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Kreditor lebih menyukai *debt ratio* yang rendah sebab tingkat keamanan dananya menjadi semakin baik. Untuk mengukur *debt ratio* bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1. *Debt to Equity Ratio*

Rasio utang dengan model sendiri (*debt to equity ratio*) merupakan imbangan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan dengan utangnya. Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk pendekatan konservatif besarnya utang maksimal sama dengan modal sendiri, artinya *debt to equity* maksimal 100%. Untuk menghitung *debt to equity* dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

1. *Time Interest Earned Ratio*

*Time interest earned ratio* yang sering disebut sebagai *converage ratio* merupakan rasio antara laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga dengan laba yang diperolehnya atau mengukur berapa kali besarnya laba bisa menutup beban bunganya. Rumus yang digunakan yaitu:

1. *Fixed Charge Converage Ratio*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa. Karena mungkinsaja perusahaan menggunakan aktiva tetap dengan cara *leasing*, sehingga harus membayar angsuran tertentu. Untuk menghitung rasio ini bisa menggunakan rumus:

1. *Debt Service Ratio*

*Debt Service Ratio* ini merupakan kemampuan perusahaan dalammemenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini mengunakan *debt ratio* (*Total Debt to Total Asset Ratio*) dikarenakan *debt ratio* dapat menunjukkan beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aset yang digunakan untuk menjamin utang.

**2.1.3 Manajemen Laba**

**2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba**

Secara umum terdapat beberapa definisi mengenai manajemen laba.

Menurut Ilham Fahmi (2013: 279) manajemen laba didefinisikan sebagai berikut:

“*Earnings management* (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan (*company management*). Tindak an earnings management sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya.”

Menurut Badruzaman (2013:14) mendefinisikan *earnings management* adalah,“Suatu cara yang ditempuh manajemen dalam mengelola perusahaan melalui pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen”.

Menurut Healy dan Wahlen dalam Sulistyanto (2008:50), manajemen laba adalah:

*“Earnings management occurs when managers uses judgement in financial reporting and in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contractual that depend on the reported accounting numbers.”*

Maksudnya manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Menurut Charles W. Mulford dan Eugene E. Comiskey yang dialihbahasakan oleh Aurolla Saparini Harahap (2010:81) manajemen laba yaitu, ”Manajemen laba adalah manipulasi akuntansi dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar terkesan lebih baik dari sebenarnya.”

Sedangkan menurut Schipper dalam Sri Sulistyanto (2008:49) menyebutkan bahwa:

“Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses).”

Berdasarkan beberapa definisi di atas bahwa sampai pada pemahaman penulis manajemen laba adalah suatu tindakan manajemen dalam memaksimalkan laba atau menurunkan laba sesuai keinginan manajemen.

* + - 1. **Faktor-Faktor Manajemen Laba**

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan Watt dan Zimmerman (1996) dalam Sulistyanto (2008:44) terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba yaitu *Bonus Plan Hypothesis*, *Debt to Equity Hypothesis*, dan *Political Cost Hypothesis*.

Dalam *Bonus Plan Hypothesis*, manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yangtinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey*(tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap*(tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada di atas *cap*, maka manajer juga tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus labih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*.

Berdasarkan*Debt to Equity Hypothesis*, manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. Perusahaan yang mempunyai *rasio debt to equity*cukup tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba, menyebabkan perusahaan kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

Di dalam *Political Cost Hypothesis*, apabila semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

**2.1.3.3 Kondisi dan Motivasi Manajemen Laba**

Menurut Scott (2003) dalam Sulistyanto (2008:63) terdapat beberapa motivasi manajemen yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, yaitu:

1. Pola Bonus (*Bonus Plan*)

Pada motivasi ini diasumsikan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan dalam upaya untuk memaksimalkan imbalan bonus.

1. Perjanjian Utang (*Debt Convenants*)

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan perjanjian utang jangka panjang yang berisikan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan pemberi pinjaman, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh dibawah tingakt yang ditetapkan, semua aktivitas yang dapat mencairkan sekuritas pemberi pinjaman.

1. Biaya Politis (*Political Cost*)

Banyak perusahaan yang secara politis nampak jelas. Motivasi praktik manajemen laba biasanya dialami oleh perusahaan-perusahaan besar, karena aktivitas operasi mereka menyentuh sebagian besar masyarakat. Perusahaan-perusahaan seperti itu akan mengatur labanya untuk mengurangi penampakannya, sebagai contoh untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah dilakukan dengan cara penurunan *earning*.

**2.1.3.4 Klasifikasi Manajemen Laba**

Klasifikasi manajemen laba menurut Sastradipraja (2010:33-34) adalah *Cosmetic Earnings Management* dan *Real Earnings Management*.

*Cosmetic earnings management* terjadi jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi *cash flow*. Teknik ini merupakan hasil dari kebebasan dalam akuntansi akrual. Akuntansi akrual membutuhkan estimasi dan pertimbangan (*judgement*) yang mengakibatkan manajer memiliki kebebasan dalam dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun kebebasan ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas usaha perusahaan yang lebih informatif, namun kebebasan ini juga memungkinkan mereka mempercantik laporan keuangan (*window-dress financial accounting*) dan mengelola *earnings*.

Sedangkan *real earnings management*terjadi jika manajer melakukan aktivitas dengan konsekuensi *cash flow*. *Real earnings management* lebih bermasalah dibandingkan dengan *cosmetic earnings management* karena mencerminkan keputusan usaha yang sering kali mengurangi kekayaan pemegang saham.

**2.1.3.5 Pola Manajemen Laba**

Pola manajemen laba menurut Scott(2009: 405) dapat dilakukan dengan cara *Taking a Bath, Income Minimazation, Income Maximization, Income Smoothing, Offsetting extraordinary/unusual gains, Aggresive accounting applications,* dan *Timing Revenue dan Expense Recognition.* Pola manajemen laba dijelaskan sebagai berikut:

1. *Taking a Bath*

*Taking a bath* terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

1. *Income Minimazation*

Dilakukan pada saat perusahaan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggisehingga jika laba periode mendatang diperkirakan

turun drastisdapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

1. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang.

1. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

1. *Offsetting extraordinary/unusual gains*

Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan trend laba

1. *Aggresive accounting applications*

Teknik yang diartikan sebagai salah saji (*misstatement*) dan dipakai untuk membagi laba antar periode.

1. *Timing Revenue dan Expense Recognition*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi. Misalnya pengakuan prematur atas pendapatan.

**2.1.3.6 Teknik Manajemen Laba**

Menurut Badruzzaman (2013:34) beberapa teknik untuk melakukan manajemen laba adalah sebagai berikut:

1. *Earnings Management within Boundary of GAAP*
2. Perubahan metode penyusutan
3. Perubahan masa manfaat aset yang akan disusutkan
4. Perubahan estimasi nilai sisa aset yang disusutkan
5. Penentuan penyisihan piutang tak tertagih
6. Penentuan penyisihan kewajiban garansi
7. Penilaian penyisihan untuk deffered tax assets
8. Penentuan keberadaan impaired assets
9. Estimasi tahap penyelesaian long-term contract
10. Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atas kontrak
11. Estimasi penurunan nilai investasi
12. Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi
13. Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan
14. Estimasi beban akrual lingkungan
15. Membuat asumsi aktuarial untuk pension plan
16. Menentukan nilai research and development cost yang boleh diakui
17. Mengubah periode amortisasi ingtangible asset
18. Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu
19. Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh signifikan terhadap *investee*
20. Menentukan permanen atau tidaknya sesuatu penurunan nilai investasi jangka panjang.
21. *Abusive Earnings Management*
22. Mempercepat *revenue recognition* yang seharusnya menjadi pendapatan periode berikutnya
23. Mencatat *understated expense*.

**2.1.3.7 Metode Pendeteksian Manajemen Laba**

**2.1.3.7.1 Konsep Akrual**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 per 1 Januari tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Dasar akrual dalam laporan keuangan memberikan kesempatan kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan sehingga menghasilkan jumlah laba yang diinginkan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan untuk menghasilkan laba sesuai yang diinginkan.

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan. Alasannya, komponen akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Kelemahan mendasar yang melekat pada akuntansi berbasis akrual, yaitu sifat *account* akrual yang rawan untuk direkayasa, denganatau tanpa harus melanggar prinsip akuntansi yang berlaku. Hanya dengan mempermainkan komponen-komponen akrual, khususnya komponen pendapatan dan biaya, perusahaan dapat mengatur besar dan kecilnya laba dalam suatu periode tertentu dibandingkan laba yang sesungguhnya (Sulistyanto, 2008:161).

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba, yaitu:

1. Pendekatan yang mengkaji akrual agregat dan menggunakan model regresi untuk menghitung akrual yang diharapkan dan yang tidak diharapkan.
2. Pendekatan yang menekankan pada akrual spesifik seperti cadangan utang ragu-ragu atau akrual pada sektor spesifik seperti tuntunan kerugian pada industri asuransi.
3. Pendekatan yang mengkaji ketidakseimbangan dalam pendistribusian pendapatan.

Dari ketiga pendekatan di atas, pendekatan yang pertama yang lebih banyak digunakan untuk mendeteksi adanya manajemen laba dengan menghitung total akrual. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) bagian akrual yang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan disebut normal akrual atau *non discretionary accrual*, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal akrual atau *discretionary accruals* (Sulistyanto, 2008:211).

**2.1.3.7.2 Pengukuran Manajemen Laba**

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2008:161).

Langkah awal untuk mengidentifikasi manajemen laba adalah dengan mengeluarkan komponen kas dari model akuntansi berbasis akrual untuk menghitung dan menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode tertentu. Untuk itu laba akuntansi di atas harus dikurangi dengan arus kas yang diperoleh dari operasi perusahaan (*Cash flow from operation*) selama periode bersangkutan (Sulistyanto, 2008:163).

Setelah berhasil menentukan besarnya komponen akrual yang diperoleh perusahaan selama satu periode, maka langkah kedua adalah memisahkan komponen akrual itu menjadi dua komponen utama, yaitu *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Sementara itu, *nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum (Sulistyanto, 2008:163).

Penelitian yang berkaitan dengan metode deteksi manajemen laba yang dilakukan oleh Dechow (1995) yang mengevaluasi berbagai alternatif model untuk deteksi manajemen laba berdasarkan akrual. Perbandingan dilakukan terhadap lima model yaitu Healy, model DeAngelo, model modified Jones, dan model industri. Manajemen laba (DACC) dapat diukur melalui *discretionary accruals* yang dihitung dengan cara menyelisihkan *total accruals* (TACC) dan *nondiscretionary accruals* (NDACC). Dalam menghitung DACC digunakan *Modified* Jones Model. *Modified* Jones Model dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow dkk (1995). Pengujian dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dengan menerapkan pengujian statistik.

Pendekatan total *accruals* yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan model yang dikembangkan oleh Haely, DeAngelo, dan Friedlan (dalam Hendra dan Yie, 2005). Healy dan DeAngelo berpendapat bahwa total *accruals* terdiri atas *discretionary accruals* dan *non discretionary accrual*s dimana total accruals tidak mudah terobservasi. Pendekatan ini berasumsi bahwa komponen *non discretionary accruals* cenderung stabil sepanjang waktu sehingga yang layak untuk dipertimbangkan adalah komponen *discretionary accruals*. Penyesuaian dilakukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa pengukuran *discretionary accruals* sepenuhnya dipengaruhi oleh pertumbuhan.

*Discretionaryaccruals* merupakan laba abnormal yang sebagian besar dikarenakan oleh item non kas yang mewakili manipulasi data. *Discretionary accruals* digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih menekankan pada keleluasaan atau kebijakan (discretion) yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka praktik yang berlaku secara umum yang masih diperdebatkan. Dengan kata lain *discretionary accruals* merupakan *accruals* dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam mengontrol jumlahnya karena *discretionary accruals* ada di bawah kebijakan (discretion) manajemen.

Penelitian ini menggunakan *discretionary accruals* dengan model modifikasi jones sebagai proksi rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen. Model Jones modifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi *earnings management* (Sulistyanto, 2008:225).

Menurut Jones (1991) dalam Bekaoulli (2007) langkah-langkah yang dilakukan dalam perhitungan *discretionary accruals* yang kemudian disebut dengan *The Modified* Jones Model adalah sebagai berikut:

1. Menghitung *Total Accruals* (TACC) untuk periode t dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

TACCit = NIit - CFOit

Keterangan :

TACCit : Total *accruals* perusahaan i pada periode t

Niit : Laba bersih perusahaan i pada periode t

CFOit : Aliran kas dari aktivitas operasi (*Cash Flow from operating activities*) perusahaan i pada periode t

2. Kemudian untuk mencari koefisien model jones (α) dilakukan regresi dengan menggunakan rumus :

TACCit/TAt-1=α1(1/TA t-1) + α2(ΔREVt/TAt-1) + α3(PPEit/TAit-1)

Keterangan:

TACCit : Total *accruals* perusahaan i pada periode t-1

TA it-1 : Total aktiva perusahaan i pada periode t-1

ΔREVit : Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan

periode t-1

PPEit : Nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t

α1 : Koefiesien regresi dari 1/TA t-1

α2 : Koefiesien regresi dari ΔREVt/TAt-1

α3 : Koefisien regresi dari PPEit/TAit-1

1. Menghitung *Non Discretionary Accruals* (NDACC) dengan menggunakan rumus:

NDACCit=α1(1/TAit-1) + α2(αΔREVit-αRECit)/ TAt-1+ α3(PPEit/TAt-1)

Keterangan :

TAt-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode t-1

ΔREVit= perubahan penjualan bersih perusahaan pada periode t

ΔRECit = perubahan *receivable* perusahaan i pada periode t

PPEit = nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t

α1α2α3 = koefisien regresi *total accruals*

4 . Menghitung *Discretionary Accruals* (DACC) dengan menggunakan rumus:

DACCit=(TACCit/TAit-1)-NDACCit

Keterangan:

DACCit : *Discretionary Acrruals*

TACCit : *Total Accruals*

NDACCit : *Nondiscretionary Accruals*

Secara empiris, nilai *discretionary accruals* dapat bernilai nol, positif, atau negatif. Nilai nol menunjukan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba, sedangkan nilai positif menunjukan adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba dan nilai negatif menunjukan manajemen laba dengan pola penurunan laba (Sulistyanto, 2008:229).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Model Jones modifikasi karena model tersebut merupakan model yang paling efektif untuk mendeteksi manajemen laba.

**2.1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang meneliti tentang hubungan antara mekanisme *good corporate governance* dan *leverage*terhadap praktek manajemen laba ini, merujuk pada beberapa penelitian terdahulu, berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Peneliti** | **Judul** | **Variabel** | **Hasil** |
| 1. | Marihot Nasution dan Doddy  Setiawan (2007) | Pengaruh *Corporate Governanc*e terhadap Manajemen Laba di Industri  Perbankan di Indonesia | *Good Corporate Governance* | 1.Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.  2. Dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 2. | Yohana Indriani (2010) | Pengaruh Kualitas Auditor, *Corporate Governance,Leverage* dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba  (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008) | *Good corporate governance* dan *Leverage* | 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 3. *Leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. |
| 3. | Subhan (2011) | Pengaruh *good corporate governance* dan *Leverage* keuangan terhadap manajemen laba Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Kepemilikan Institusi, Komisaris Independen, Dewan Direksi, *Leverage* | 1.Komposisi komisaris independen tidak signifikan terhadap manajemen laba  2. *Leverage* tidak signifikan terhadap manajemen laba |
| 4. | Izzati Amperaningrum (2013) | Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage*, Dan  Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba (Studi  Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di  Bursa Efek Indonesia) | *Good corporate governance* dan *Leverage* | 1. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. 2. Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 3. *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management.* |
| 5. | Debby Natalia (2013) | Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Praktik Earning Management Badan Usaha Sektor Perbankan di BEI 2008-2011 | *Good Corporate Governance* dan *leverage* | Kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komisaris independen dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |
| 6. | Hikmah Is’ada Rahmawati (2013) | Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap  Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan | *Good Corporate Governance* | *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Mekanisme *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, dewan komisaris dan komisaris independenserta *leverage* yang diharapkan dapat meningkatkan proses pengawasan terhadap manajemen sehingga mencegah terjadinya praktik manajemen laba yang dapat berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *corporate governance* dan *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut. Setelah penelitian terdahulu melakukan penelitian dalam perusahaan perbankan BUMN, penulis bermaksud meneliti perusahaan BUMN non-keuangan.

**2.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba**

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan *Good Corporate Governance.* Penerapan *Good Corporate Governance* khususnya struktur kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan komisaris independen diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba.

Penelitian Izzati (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage*, dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)” bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian Yohana (2010) dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas Auditor, Corporate Governance, Leverage dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba” bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan. Menurut penelitian Yohana (2010) kepemilikan manajerial dapat mengurangi dorongan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi sehingga laba yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) dalam Simposium Nasional Akuntansi 10 (Makassar) dengan judul “Pengaruh *Corporate Governanc*e terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan di Indonesia”. Hasil penelitiannya, komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Semakin sedikit dewan komisaris maka tindak manajemen laba semakin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya.

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* secara menyeluruh diteliti oleh Subhan (2011), Debby (2013), dan Hikmah (2013) yang meneliti dengan objek perusahaan perbankan menghasilkan kesimpulan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh tidak terhadap manajemen laba.

**2.2.2 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba**

*Leverage* merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Dengan semakin banyaknya utang maka manajemen harus dapat lebih meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetap dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya*. Leverage* yang tinggi akan berpengaruh dengan nilai pembiayaan yang juga tinggi dengan maksud untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka panjang, dengan mempertahankan kinerja perusahaan tersebut, diharapkan kreditur juga akan tetap memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan (Subhan, 2011).

Hasil penelitian oleh Subhan (2011), bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba dalam objek penelitian perusahaan perbankan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Izzati (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh pada perusahaan perbankan. Menurut Izzati, *leverage* yang tinggi dapat menyebabkan manajer melakukan tindak manajemen laba. Jadi berdasarkan penelitian tersebut, menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba.

Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

*Good Corporate Governance*

H1

Manajemen Laba

*Leverage*

H2

H3

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara dari penelitian, yaitu terdapat pengaruh*good corporate governance* dan *leverage* pada manajemen laba.

Berdasarkan hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : “Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* secara parsial terhadap manajemen laba.”

H2 : “Terdapat pengaruh *Leverage* secara parsialterhadap manajemen laba.”

H3 : “Terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Leverage* secara simultan terhadap manajemen laba.”